

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DALAM KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Oleh

H. Akmal Hamsa

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar)

THE TEACHING OF INDONESIAN LANGUAGE IN COMPETENCY BASED CURRICULUM

ABSTRACT

In reformation era, people wish to have changes in various dimensions of life. They attempt to develop the quality of human resources in order to have high competitive power through the modification of educational curriculum, which is in accordance with the change of time and the demand of community development.

The operation of the educational system, therefore, has moved from centralized system to decentralized one. This movement can be considered as the consequence of the application of the educational rule No. 20, the year 2003. In this case, competency based curriculum implies that the teaching of language and Indonesian literature refers to the achievement of standard competency based on the nature of the teaching and learning of Indonesian, that is, communicative competence and literature appreciation. These two competencies should be presented through the teaching and learning of language (communicative) skills, and should be done integrately, both in an attempt to achieve linguistic competency and to achieve competency in literary appreciation.

Key words: teaching and learning, Indonesian language, competency based curriculum

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir. Masyarakat menuntut dan berupaya mewujudkan perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, politik,

hukum, sosial, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, reformasi harus dilakukan dalam upaya pengembangan kualitas SDM. Terkait dengan hal itu, Azra (1999) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan SDM yang memiliki daya saing dan daya sanding yang tinggi tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan pendidikan. Pendidikan dirumuskan



Karikatur 'The Angel'
Karya Nyoman Sutrisni
Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa, Undiksha
2008

sebagai proses pembudayaan (enkulturisasi) peserta didik sehingga mereka menjadi warga negara yang memiliki keadaban (civility) yang pada gilirannya menjadi pilar bagi pembentukan masyarakat madani Indonesia.

Secara faktual diakui bahwa pada era reformasi saat ini, pendidikan dihadapkan pada sejumlah tantangan sebagai konsekuensi perubahan global, krisis dalam berbagai bidang kehidupan, dan tantangan yang mengharuskan adanya perubahan sistem pengelolaan pendidikan. Hal ini berarti bahwa tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. Namun, pada sisi lain, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan pendidikan bergeser dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam sektor pendidikan merupakan implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan implikasi terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Dengan demikian, diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodasi semua potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Selain itu, dalam wacana globalisasi, keluaran sekolah diharapkan memiliki kemampuan yang bersifat kompetitif di antara persaingan global. Jadi, diperlukan kurikulum yang memberi kesempatan kepada setiap sekolah untuk memiliki ciri khas dan pusat keunggulan, dan dalam pelayanan pendidikan juga memberi kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Dengan perkataan lain, sekolah, selain bisa melaksanakan kurikulum sesuai dengan tuntutan minimal yang bersifat nasional, sekolah juga diberi kesempatan un-

tuk mengembangkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dengan demikian menurut Ali (2003) Sistem desentralisasi diharapkan dapat menjawab permasalahan utama kurikulum pendidikan, yakni masalah relevansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas.

Masalahnya, hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum yang berlaku saat ini belum relevan dengan keberagaman kemampuan daerah. Kemampuan yang dimaksud mencakup kemampuan sumber daya, seperti ketenagaan, penyediaan teknologi, dan sarana pembelajaran. Hal itu berdampak pada keragaman kemampuan siswa. Masalah akuntabilitas belum jelas karena tidak disertai dengan standar kemampuan yang perlu dicapai. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang efisien. Selanjutnya, masalah fleksibilitas juga belum jelas yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa jumlah jam pelajaran ditentukan secara nasional. Akibatnya sekolah terikat untuk melaksanakan PBM sesuai alokasi waktu yang ditetapkan. Dengan begitu, guru kurang memiliki keleluasaan untuk menambah atau mengurangi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan nyata yang dihadapi. Guru menjadi kurang inovatif dan kurang mampu mengembangkan kemahiran kritisnya. Semua itu menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip psikologis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Terkait dengan semua permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan sumbang pendapat.

Landasan Pengembangan Kurikulum Secara Umum

Pengembangan kurikulum memerlukan landasan agar memiliki pijakan yang kuat. Terkait dengan hal itu, secara umum, kurikulum pendidikan di Indonesia dikembangkan berdasarkan landasan (a) filosofis, (b) sosiologis, (c) psikologis, dan (d) yuridis (Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2003).

Secara filosofis, Pancasila merupakan landasan utama, yakni landasan yang berakar dari pandangan tentang manusia dan pendidikan itu sendiri. Pendidikan memandang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, dan makhluk sosial. Secara filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai suatu pranata sosial yang berinteraksi dengan pranata sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan hukum. Pandangan tentang pendidikan ini dapat membuat pendidikan menjadi kepedulian semua pihak.

Landasan sosiologis digunakan karena pendidikan merupakan pranata sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis. Pada saat ini dan yang akan datang, kesadaran kolektif bangsa dalam rangka ikut memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting untuk dikembangkan. Secara sosiologis pendidikan nasional dirancang untuk mengatasi masalah yang berkaitan rekonstruksi sosial dengan segala persoalan kemasyarakatan yang muncul, termasuk disintegrasi sosial, konflik antar etnis, dan perilaku kekerasan. Di samping itu, pendidikan nasional juga dirancang untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi yang semakin tajam akibat dari perbedaan akses terhadap sumber daya yang terjadi di masyarakat. Juga, untuk memperkuat jati diri dalam era komunikasi tanpa batas, tanpa mengisolasi diri dari percaturan informasi dan komunikasi.

Landasan psikologis digunakan karena pendidikan merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan proses pembudayaan (enkulturisasi) yang berorientasi pada nilai-nilai dasar yang mencakup keimanan dan ketakwaan, kemerdekaan, kebangsaan, keseimbangan dalam perkembangan kepribadian dan kecerdasan anak, pembudayaan, kemandirian, kemanusiaan dan kekeluargaan.

Landasan yuridis digunakan agar sistem pen-

didikan nasional memiliki legitimasi dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk menjamin terjadinya perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang maju dalam tatanan kehidupan Nasional. Pentingnya pendidikan telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipandang memiliki makna yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hanya pengajaran semata. Perundangan dan peraturan penyelenggaraan pendidikan nasional disusun berdasarkan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini menjamin terjadinya sinergi antara kepentingan pusat dan daerah serta semua stakeholders pendidikan nasional. Keberpihakan pemerintah tidak hanya diberikan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

GBHN 1999 menegaskan tentang perlunya diversifikasi kurikulum yang dapat melayani keanekaragaman kemampuan sumber daya manusia, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan budaya di daerah. Diversifikasi kurikulum menjamin hasil pendidikan bermutu yang dapat membentuk masyarakat Indonesia yang damai, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing untuk maju.

Diversifikasi kurikulum ini merupakan tuntutan desentralisasi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan adanya kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. untuk "mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat" (Pasal 4). Kewenangan pemerintah daerah tersebut perlu dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada

semua aspek pemerintahan (Penjelasan atas PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom). Dalam konteks desentralisasi dan seiring dengan perwujudan pemerataan hasil pendidikan bermutu, kurikulum yang memuat kompetensi umum lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional, dan global sangat diperlukan. Kompetensi umum ini harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui Standar Kompetensi yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan. Fokus hasil pendidikan yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa yang berciri-ciri demikian, kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan aspek-aspek: (1) Diversifikasi Kurikulum, (2) Standar Kompetensi; (3) Kurikulum Berbasis Kompetensi, (4) Empat Pilar Pendidikan Kesejagatan, (5) Partisipasi Masyarakat, dan (6) Manajemen Berbasis Sekolah (Syafi'ie, 2001: 2).

C. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang memberi penekanan pada dominan berupa berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam setiap bidang studi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap jenjang sekolah. KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada (a) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (b) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan (Kwartolo, 2002). Di samping itu, KBK merupakan kerangka inti dengan empat komponen, yaitu (a) kurikulum dan hasil belajar,

(b) penilaian berbasis sekolah, (c) kegiatan belajar mengajar, dan (d) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (Ali, 2003). Komponen-komponen tersebut mengungkapkan berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. KBK memberi peluang yang besar tercapainya visi pendidikan, yakni lulusan yang memiliki dasar-dasar karakter, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih komprehensif untuk digunakan dalam mengadakan hubungan interaktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Kompetensi yang dituntut bagi peserta didik, mencakup (a) kompetensi umum mata pelajaran, (b) kompetensi kinerja minimal pada mata pelajaran atau rumpun tertentu, dan (c) kompetensi dasar, yakni kemampuan minimal dalam penguasaan konsep/materi yang dibelajarkan atau penguasaan materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar (Kwartolo, 2002).

Selanjutnya, KBK berimplikasi pada luaran sekolah yang memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu merupakan standar kemampuan minimal yang harus dimiliki setiap luaran sekolah yang ditetapkan secara nasional. Upaya mencapai kompetensi dasar itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan sekolah masing-masing. Untuk itu, diperlukan adanya standar yang dijadikan kriteria keberhasilan yang berkaitan dengan (a) apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa, (b) program pembelajaran yang mengembangkan cara-cara belajar, (c) program pengajaran ilmu-ilmu dasar dan budi pekerti, dan (d) acuan pokok penilaian atau indikator penilaian (Abimanyu, 2003; Ali, 2003).

Standar nasional berisi kerangka tentang apa yang harus diketahui, dilakukan, dan dikuasai oleh peserta didik pada setiap tingkatan. Kerangka ini disajikan dalam bentuk pengembangan penguasaan ilmu-ilmu dasar dengan sistematika keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademik. Standar ini juga disertai dengan standar pembentukan akhlak mulia yang mengutamakan pembentukan sistem nilai untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dan beretos kerja.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemampuan dasar adalah perlunya sekolah menjadi suatu lembaga yang dinamis, berorientasi ke masa depan, dan mampu menciptakan lingkungan yang aman. Hal ini berarti bahwa komitmen dari tenaga kependidikan amat diperlukan untuk memberi layanan dan penghargaan terhadap perbedaan cara-cara pencapaian hasil belajar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Untuk pengembangan kepribadian yang berbasis budaya, misalnya, masyarakat Sulsel dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai budaya siri' yang mencakup *lempu'* (lurus, jujur), ada tongeng (berkata benar), *getteng* (teguh pada keyakinan yang benar), *sipakatau* (saling menghargai sesama manusia), *pesse/pacce* (sikap empati), *assitinajang* (kepatutan), *ceppa lilah* (cerdas memecahkan masalah), *reso* (usaha) dan *mappesona ri dewata seuae* (berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa) (Abdullah, 1997; Marzuki, 1995; Rahim, 1992). Nilai-nilai siri' yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, penghargaan, etos kerja, dan religiusitas ini seyogianya menjadi referensi dalam pengembangan kepribadian peserta didik. Persoalannya, apakah aplikasi nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Bugis-Makassar tidak menunjukkan gejala yang semakin merosot, termasuk dalam lingkup persekolahan?

D. Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

Untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. Standar kompetensi ini dimaksudkan agar siswa siap mengakses situasi multiglobal lokal yang berorientasi pada keterbukaan dan

kemasadepanan. Kurikulum ini diarahkan agar siswa terbuka terhadap beraneka ragam informasi yang hadir di sekitar kita dan dapat menyaring yang berguna, belajar menjadi diri sendiri, dan siswa menyadari akan eksistensi budayanya sehingga tidak tercerabut dari lingkungannya.

Harapan yang diinginkan melalui penguasaan standar kompetensi BI antara lain sebagai berikut. (1) Siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya dan hasil intelektual bangsa sendiri. (2) Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi berbahasa siswa dengan menyediakan beraneka ragam kegiatan berbahasa dan sumber belajar. (3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya. (4) Orang tua/masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program di sekolah. (5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. (6) Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar sesuai kondisi dan kekhasan daerah.

1. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMA & MA

a. Berdaya tahan dalam berkonsentrasi mendengarkan berbagai konteks sampai dengan seratus dua puluh menit dan mampu memahami dan peka terhadap gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap dalam uraian, khotbah, pidato, ceramah, dialog, dan film serta mampu memberikan pendapat dan penilaian.

b. Menyampaikan ceramah; berdiskusi dalam seminar; meyakinkan orang lain, memberi petunjuk, menjelaskan suatu proses secara rinci, mengaitkan berbagai peristiwa, mengkritik, dan berekspresi dalam berbagai keperluan dan konteks.

c. Membaca berbagai ragam teks; menganalisis

informasi dan gagasan; memberikan komentar, menyeleksi dan mensintesis informasi dari berbagai sumber.

d. Menulis karangan fiksi dan nonfiksi dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif untuk menimbulkan efek dan hasil tertentu.

e. Mengapresiasi sastra melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan melisankan hasil sastra berupa puisi, cerita pendek, novel, drama; memahami dan menggunakan pengertian teknis kesusastraan dan sejarah sastra untuk menjelaskan, meresensi, menilai, dan menganalisis hasil sastra, memerankan drama, menulis karya cipta sastra berupa puisi, cerita pendek, novel, dan drama.

2. Pengertian

Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berhubungan (berkomunikasi), saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

3. Fungsi dan Tujuan

a. Fungsi

Standar Kompetensi ini disiapkan dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya, yang berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, (4) sarana penyebaran pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana pengembangan penalaran, dan (6) sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusastraan Indonesia.

b. Tujuan

Tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai berikut.

1. Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara.

2. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk beragam tujuan, keperluan, dan keadaan.

3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial.

4. Siswa memiliki disiplin berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis).

5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.

6. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

4. Ruang Lingkup

Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA dan MA terdiri atas dua aspek, yaitu aspek kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Aspek kemampuan berbahasa dan bersastra masing-masing terbagi atas sub-aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

5. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum ini meliputi:

a. memiliki keyakinan, menyadari, serta men-

jalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai budaya dan agama;

b. menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, mengomunikasikan gagasan, dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain;

c. memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan antar unsur;

d. memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber;

e. memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat;

f. berpartisipasi, berinteraksi, berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis;

g. berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat yang beradab;

h. berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan;

i. menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain.

6. Standar Kompetensi Bahan Kajian Bahasa Indonesia Aspek:

a. Kemampuan Berbahasa Sub-aspek

1) Mendengarkan

Mendengarkan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap gagasan, pendapat, kritikan, dan perasaan orang lain dalam berbagai bentuk wacana lisan.

2) Berbicara

Berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, kritikan, perasa-

an, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan.

3) Membaca

Membaca dan memahami berbagai jenis wacana, baik secara tersurat maupun tersirat untuk berbagai tujuan.

4) Menulis

Menulis secara efektif dan efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks.

b. Kemampuan Bersastra Sub-aspek

1) Mendengarkan

Mendengarkan, memahami, dan mengapresiasi karya sastra (puisi, prosa, drama) baik karya asli maupun saduran/terjemahan sesuai tingkat kemampuan siswa.

2) Berbicara

Membahas dan mendiskusikan ragam karya sastra sesuai dengan isi dan konteks lingkungan dan budaya.

3) Membaca

Membaca dan memahami berbagai jenis dan ragam karya sastra, serta mampu melakukan apresiasi secara tepat.

4) Menulis

Mengekspresikan karya sastra yang diminati (puisi, prosa, drama) dalam bentuk sastra tulis yang kreatif, serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan ragam sastra yang sudah dibaca.

7. Pendekatan Pembelajaran

Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Dengan demikian, setiap warga dituntut untuk terampil berbahasa. Keterampilan yang baik dalam berbahasa dapat membuat komunikasi antarwarga berlangsung dengan tenteram dan damai.

Komunikasi yang dimaksud adalah suatu proses penyampaian maksud pembicara kepada orang lain dengan menggunakan saluran tertentu. Maksud komunikasi dapat berupa pengungkapan pikiran, gagasan, ide, pendapat, per-

setujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan lain-lain. Hal itu disampaikan dalam aspek kebahasaan berupa kata, kalimat, paragraf, dengan memperhatikan ejaan, dan tanda baca dalam bahasa tulis serta unsur prosodi (intonasi, nada, irama, tekanan, tempo) dalam bahasa lisan.

Dalam berkomunikasi agar kedua belah pihak (yang berperan sebagai penyampai maksud dan penerima maksud) dapat menjalin komunikasi dengan baik, diperlukan prinsip kerja sama antar keduanya. Kerja sama itu dapat diciptakan dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain siapa yang mengajak berkomunikasi, kepada siapa disampaikan, pada situasi atau tempat yang mana, pada waktu yang bagaimana, dengan isi pembicaraan yang bagaimana, dan media apa yang digunakan.

Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi. Karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi. Keterampilan ini diperkaya oleh fungsi utama sastra untuk penghalusan budi, peningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya dan penyaluran gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan maupun tertulis. Siswa dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bukan dituntut lebih banyak menguasai atau menghafalkan pengetahuan tentang bahasa. Pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi karya sastra.

Kata menduduki posisi penting dalam berbahasa dan terutama dalam bersastra. Oleh sebab itu, penguasaan kosakata seseorang sangat menentukan keberhasilannya dalam berkomunikasi. Pembelajaran kosakata bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan kata siswa. Siswa tidak mengembangkan kata semata-mata melala-

lui kegiatan menghafal, tetapi melalui banyak membaca dan menggunakannya dalam kalimat. Mengenal dan memahami makna kata merupakan tujuan utama pembelajaran kosakata.

8. Pengorganisasian Materi

Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kerangka tentang standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh siswa pada setiap tingkatan. Kerangka ini disajikan dalam empat komponen utama: (1) Standar Kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) indikator, dan (4) materi pokok.

Standar Kompetensi mencakup aspek kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Aspek-aspek tersebut perlu mendapat porsi yang seimbang dan dilaksanakan secara terpadu. Kompetensi tersebut disajikan secara terpadu dengan kompetensi yang lainnya (Depdiknas, 2003).

Kemampuan dasar, indikator, dan materi pokok yang dicantumkan dalam Standar Kompetensi merupakan bahan minimal yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, daerah, sekolah atau guru dapat mengembangkan, menggabungkan, atau menyesuaikan bahan yang disajikan mengikuti situasi dan kondisi setempat.

9. Penomoran dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Penomoran dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dimaksudkan untuk memudahkan penandaan jumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nomor tersebut bukan merupakan urutan yang harus diikuti dalam pembelajaran. Guru harus memadukan berbagai kompetensi dasar dalam setiap aspek sehingga menjadi pembelajaran yang terpadu. Contoh: SK 1 dengan KD 1.1 dapat digabung dengan SK 2, KD 2.2

10. Bacaan Wajib Sastra

Sebagai upaya meningkatkan apresiasi sastra dan gemar membaca, setiap siswa pada satuan jenjang SMA dan MA diwajibkan membaca lima belas buku sastra (puisi, cerpen, novel, drama, esai) selama tiga tahun. Daftar buku tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran atau dicari pada sumber lain. Pengajaran apresiasi sastra ini harus disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat pada aspek kemampuan bersastra.

11. Struktur Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pelaksanaan pembelajaran sejumlah mata pelajaran dalam KBK dirumuskan dalam bentuk struktur kurikulum. Pembelajaran bahasa Indonesia diberikan pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak diberikan pada program kegiatan belajar Pengembangan Kemampuan Dasar. Pada program tersebut diberikan materi pengembangan kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, dan materi akademik. Selain program itu, diberikan pula program Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi. Alokasi waktu dari ketiga program kegiatan belajar tersebut diberikan selama 150 menit per hari.

Pada struktur kurikulum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dalam dua ketentuan. Ketentuan untuk kelas I dan II, pembelajaran bahasa Indonesia diberikan dengan penekanan pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Oleh karena itu materi yang diberikan adalah membaca dan menulis permulaan. Alokasi waktu yang disiapkan adalah 50% dari 27 jam per minggu, termasuk pembelajaran materi berhitung. Setiap satu jam pelajaran berlangsung selama 35 menit. Pada kelas III sampai dengan kelas VI, pembelajaran bahasa Indonesia sudah diberikan tersendiri (tidak lagi diberikan bersama dengan berhitung). Alokasi waktu yang disediakan sebanyak 6 jam per minggu dengan ketentuan 40 menit per jam.

Penekanan pembelajarannya pada aspek peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis.

Pembelajaran bahasa Indonesia pada struktur kurikulum di Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah diberikan secara tersendiri sebagai satu mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas. Alokasi waktu yang disiapkan 5 jam per minggu pada setiap tingkatan kelas. Setiap jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Kurikulum Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah disediakan dua macam struktur, yaitu: (a) Struktur Kurikulum Pengkhususan Program Studi dan (b) Struktur Kurikulum Non-pengkhususan Program Studi. Hal itu dimaksudkan agar sekolah dapat menentukan sendiri struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (Depdiknas, 2003: 9).

Struktur Kurikulum Pengkhususan Program Studi dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada peserta didik dalam memilih salah satu program studi secara khusus. Pada program ini, kelas X (I) merupakan program bersama yang diikuti oleh semua peserta didik. Semua peserta didik diberikan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia selama empat jam per minggu, setiap jam 45 menit. Pada kelas XI (II) dan XII (III), peserta didik dikelompokkan menjadi tiga program studi, yaitu: (1) Ilmu Alam, (2) Ilmu Sosial, dan (3) Bahasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui prinsip-prinsip yang sesuai dengan program studi yang diikuti (diminati). Pada Program Studi Ilmu Alam, pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diberikan selama tiga jam per minggu dengan waktu 45 menit per jam. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Studi Ilmu Sosial diberikan empat jam per minggu dengan waktu 45 menit per jam. Adapun pembelajaran bahasa Indonesia pada Program Studi Bahasa disajikan dalam dua mata pelajaran setiap minggu, yaitu "Bahasa dan Sastra Indonesia" dan "Sastra Indonesia". Alokasi waktu yang

digunakan kedua mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut sama, yaitu masing-masing empat jam per minggu dalam waktu 45 menit per jam.

Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah pada Non-Pengkhususan Program Studi dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Mata pelajaran yang diberikan disediakan dalam dua paket program mata pelajaran, yaitu paket mata pelajaran "A. Inti" dan paket mata pelajaran "B. Pilihan". Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diberikan/diajarkan, baik pada paket "A. Inti" maupun pada paket "B. Pilihan". Pada paket "A. Inti", Bahasa dan Sastra Indonesia hanya diberikan di kelas X semester 1 dan 2 dengan alokasi waktu 6 jam per minggu, 45 menit per jam. Pada kelas XI dan XII, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diberikan sebagai paket "B. Pilihan" masing-masing pada semester 1 saja dengan alokasi waktu yang disediakan empat jam per minggu selama 45 menit per jam. Hal ini didasarkan pada minat dan kemampuan peserta didik untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan di bidang bahasa dapat memilih beberapa mata pelajaran yang bercirikan bidang kebahasaan ditambah dengan mata pelajaran lainnya.

Jumlah jam pelajaran pilihan di kelas XI adalah 28 jam dengan memilih tujuh mata pelajaran dari 20 mata pelajaran yang disediakan. Adapun jumlah jam pelajaran pilihan di kelas XII adalah 24 jam dengan memilih enam mata pelajaran dari 20 mata pelajaran yang disediakan. Kedua puluh mata pelajaran tersebut (termasuk Bahasa dan Sastra Indonesia) tidak ada yang diberikan pada semester dua. Yang diberikan pada semester dua pada kelas XI dan XII hanya empat mata pelajaran pada paket "A. Inti" dari sembilan mata pelajaran yang disediakan, yaitu: Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Kesenian, dan Pendidikan Jasmani masing-masing dua jam pelajaran per-

minggu.

E. KESIMPULAN

Tuntutan reformasi yang ingin mewujudkan perubahan masyarakat merupakan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing dan daya saing yang tinggi. Hal itu memerlukan perubahan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan perkembangan masyarakat. Pengelolaan sistem pendidikan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003. KBK mengimplementasikan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengacu kepada pencapaian standar kompetensi yang berprinsip pada hakikat pembelajaran bahasa, yaitu kompetensi berkomunikasi dan mengapresiasi sastra. Kedua kompetensi itu diperoleh melalui pembelajaran keterampilan berbahasa (komunikasi), yang dilakukan secara terpadu, baik dalam hal pencapaian kompetensi kebahasaan maupun dalam pencapaian kompetensi kesastraan.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, A.E. (1997). "Beberapa Unsur Budaya Bugis-Makassar dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Koseling". Makalah. Purwokerto: Panitia Seminar dan Konvensi Nasional Bersama Devisi-Devisi IPBI.
- Abimanyu, S. 2003. "Pengembangan Kurikulum, Laboratorium, dan Pusat Pembelajaran". Makalah. Surabaya: Panitia Semiloka FIP-JIP Indonesia.
- Ali, M. 2003. "Pengembangan Kurikulum: Isi, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi". Bahan Diskusi Kebijakan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Depdiknas.
- Azra, A. 1999. "Membangun Kembali Karakter Bangsa: Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi". Makalah. Yogyakarta: Panitia Seminar Humaniora Diesnatalis ke-50 Universitas Gajah Mada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA dan MA". Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "Kurikulum Berbasis Kompetensi: Ketentuan Umum, Pendidikan Prasekolah, Dasar, dan Menengah Umum. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2003. "Dasar Standarisasi Profesi Konseling". Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Kwartolo, Y. 2002. "Catatan Kritis tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal Pendidikan Penabur. No. 1. Tahun 2002. hal. 75-85.
- Marzuki, L. 1995. *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Rahim, A. R. 1992. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Syafi'ie, Imam. 2001. "Penjabaran Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran Bahasa Indonesia". Makalah. Malang: Panitia Seminar Sehari Menyongsong Pemberlakuan Kurikulum Baru Bidang Studi Bahasa Indonesia.

Intanrahmawati27@yahoo.com